



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan Peraturan Bupati

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN.

/

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
5. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
6. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
7. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
9. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
10. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
11. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II

RUANG LINGKUP INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk :

- a. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
- b. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. Pengukuran kinerja;
- e. Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- d. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- e. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 (satu) dan Lampiran 2 (dua) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan diberikan tugas untuk melakukan review dan evaluasi atas pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- b. Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melakukan evaluasi atas capaian kinerja Indikator Kinerja Utama setiap Perangkat Daerah dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

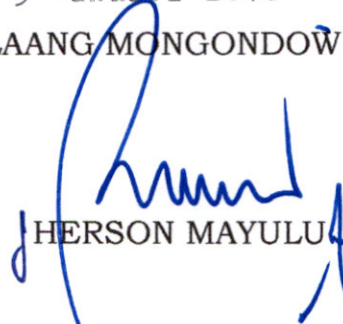
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 89 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2016-2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

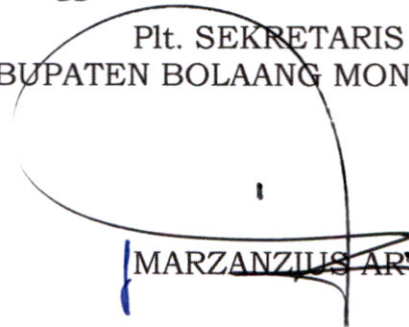
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 3 Januari 2018
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


HERSON MAYULU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 3 Januari 2018


Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN
2018 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW SELATAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan kinerja Birokrasi	Opini BPK Terhadap Keuangan Daerah	Hasil Penilaian BPK Terhadap LKPD	Hasil Penilaian BPK Terhadap LKPD	Inspektorat Daerah
		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Kabupaten	Hasil Penilaian KemenPAN-RB atas AKIP	Hasil Penilaian MenPANRB atas AKIP	Sekretariat Daerah
		Nilai dan Pemingkatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Laporan Hasil Pelaian oleh Kemendagri	Laporan Hasil Pelaian oleh Kemendagri	Sekretariat Daerah
		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Hasil Reformasi Birokrasi oleh KemenPAN-RB	Nilai Hasil Reformasi Birokrasi oleh KemenPAN-RB	Sekretariat Daerah Inspektorat Daerah
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Sekretariat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penanganan Terhadap Pelanggaran PERDA	Jumlah pelanggaran perda tahun n ----- x 100% Jumlah pelanggaran perda tahun n-1	Rekap jumlah pelanggaran perda	Satuan Polisi Pemong Praja
4	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Persentase penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak serta trafficking	Jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak serta tracffiking yang ditangani ----- x 100 % Jumlah kasus yang masuk P2TP2A	Rekap jumlah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Indeks Pembangunan Gender	ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Dalam penghitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG) ada tiga komponen penyusun IDG, yaitu : keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan.	BPS	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Meningkatnya Akses Pelayanan Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni - SD/MI - SMP/MTs	Jumlah Penduduk Usia 7-12 thn dan usia 13-15 thn yang bersekolah ----- x 100% Jumlah Penduduk Usia 7-12 thn dan usia 13-15 thn	Rekap Jumlah Siswa, Data Kependudukan, BPS	Dinas Pendidikan
		Angka Kelulusan - SD/MI - SMP/MTs	Jumlah Siswa Lulus ----- x100% Jumlah Siswa terdaftar Ujian	Rekap data kelulusan, rekap data peserta ujian	Dinas Pendidikan
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah - SD/MI - SMP/MTs	$MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{Lama sekolah penduduk ke-i})$ Dengan : P15+ = jumlah penduduk berusia 15 thn keatas Lama Sekolah penduduk ke-I = a. Tidak pernah sekolah = 0 b. Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1 c. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1 d. Tidak bersekolah lagi dan tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir e. Tidak sekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1	BPS	Dinas Pendidikan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Penduduk yang berusia >15 tahun belum melek huruf (buta aksara)	Jumlah Pendudukan Usia >15 thn belum melek huruf ----- x 100% Jumlah Penduduk Usia 15 Thn	BPS, Rekap data buta aksara	Dinas Pendidikan
		Angka Putus Sekolah - SD/MI - SMP/MTs	Jumlah Siswa Putus Sekolah ----- x 100% Jumlah Siswa Keseluruhan	Rekap data siswa putus sekolah	Dinas Pendidikan
		Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	Jumlah lulusan SD/MI ----- x 100% Jumlah melanjutkan	Rekap data siswa melanjutkan	Dinas Pendidikan
5	Meningkatkan sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan tempat peribadatan/agama	Rasio Ketersediaan Sekolah a. SD/MI b. SMP/MTs	Jumlah Siswa : Jumlah Sekolah	Rekap data siswa dan data sekolah	Dinas Pendidikan
		Jumlah Puskesmas Terakreditasi	Jumlah Puskesmas Terakreditasi ----- x 100% Jumlah Keseluruhan Puskesmas	Rekap data puskesmas terakreditasi	Dinas Kesehatan
		Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi	Jumlah Rumah Sakit terakreditasi	Rekap data rumah sakit terakreditasi	Dinas Kesehatan
		Jumlah Rumah Peribadatan	Jumlah Rumah Peribadatan	Rekap data rumah ibadah	Sekretariat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Meningkatnya Pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas serta mudah dijangkau oleh masyarakat	Persentase Peserta Jaminan Kesehatan Nasional	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang terjamin}}{\text{Jumlah Masyarakat Seluruhnya}} \times 100\%$	Rekap data jaminan kesehatan nasional	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Balita Gizi Buruk	$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk}}{\text{Jumlah balita}} \times 100\%$	Rekap data balita gizi buruk	Dinas Kesehatan
		Angka Usia Harapan Hidup	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.	Rekap data kematian	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi per 1000 harapan hidup	$\frac{\text{Jumlah bayi lahir mati}}{\text{Jumlah bayi lahir}} \times 100\%$	Rekap data kematian bayi	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran	$\frac{\text{Jumlah kematian ibu yang disebabkan karena kehamilan, persalinan sampai 42 hari setelah melahirkan}}{\text{Jumlah Ibu Melahirkan}} \times 100\%$	Rekap data kematian ibu	Dinas Kesehatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase bayi usia 0-11 bln yang dapat imunisasi dasar lengkap	Jumlah bayi 0-11 bln yang mendapat imunisasi dasar lengkap ----- x 100% Jumlah bayi keseluruhan	Rekap data bayi yang diimunisasi	Dinas Kesehatan
7	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah - SD/MI - SMP/MTs	Jumlah Siswa Usia Sekolah ----- x 100% Jumlah Penduduk Usia Sekolah	Rekap data siswa dan penduduk	Dinas Pendidikan
		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$	BPS	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
8	Meningkatkan Prestasi Bolaang Mongondow Selatan di Tingkat Nasional dan Regional	Jumlah Event Olahraga Berkelas Regional dan Nasional di Bolssel	Even Olahraga Berkelas Regional dan Nasional di Bolssel	Rekap Jumlah Even	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Jumlah Prestasi Olahraga ditingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah Prestasi ditingkat Provinsi dan Nasional	Rekap Jumlah Prestasi	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Jumlah Seni-Budaya Bolssel yang tampil di Forum Provinsi dan Nasional	Jumlah Seni Budaya Bolssel Yang Tampil	Rekap Jumlah penampilan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja dan Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Jumlah Angkat Kerja 15-65 thn ----- x 100% Penduduk usia 15-65 thn	Data angkatan kerja dan data penduduk	Dinas PM, PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Tingkat pengangguran terbuka	Jumlah Pengangguran ----- x 100% Jumlah Angkatan Kerja	Rekap data pengangguran, rekap data angkatan kerja, BPS	Dinas PM, PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
9	Meningkatnya Jumlah Izin dan Investasi Daerah	Nilai investasi	Jumlah investasi di daerah	Rekap data investasi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Tingkat Pendapatan PAD	Rekap data pendapatan PAD	Rekap data pendapatan PAD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
10	Meningkatkan Penguatan Ekonomi Kerakyatan	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	$\frac{PDRB_1 - PDRB_0}{PDRB_0} \times 100\%$ $PDRB_1$ = PDRB ADHK pada suatu tahun $PDRB_0$ = PDRB ADHK pada tahun sebelumnya	BPS	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Indeks Gini Ratio	$GR = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n f_{pi} \times (Fc_i + Fc_{i-1})}{n}$ GR = Koefisien Gini Fpi= frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke 1 Fci=frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke i	BPS	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Fci-1 = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)		
		Persentase koperasi aktif	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif}}{\text{Jumlah Koperasi}} \times 100\%$	Rekap data koperasi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
		Prosentase Pertumbuhan UMKM	$\frac{\text{UMKM thn } n - \text{UMKM thn } n-1}{\text{UMKM thn } n-1} \times 100\%$	Rekap data UMKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
		Tingkat Daya Beli	Survey daya beli masyarakat	BPS / Data survey tingkat daya beli	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
		Tingkat Kemiskinan	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ $\alpha = 0$ z = garis kemiskinan y_i = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($=1,2,3,\dots,q$), $y_i < z$ q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk	BPS	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Lokal Yang Bernilai Ekonomis Tinggi	Skor Pola Pangan Harapan	Metode susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama untuk menilai ketersediaan pangan. Semakin tinggi skor mutu pangan, menunjukkan situasi pangan semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya. Komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Komposisi kelompok pangan utama yang menjadi obyek analisis adalah sama dengan obyek analisa yang digunakan untuk menghitung Skor PPH Ketersediaan.	BPS, data hasil analisa pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Ketersediaan Pangan Utama	Komoditas sampel yang diambil pangan segar dengan kriteria: a) banyak diproduksi; b) banyak dikonsumsi dan c) diduga mempunyai permasalahan ketidakamanan pangan	Hasil survey tingkat ketersediaan pangan masyarakat	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah Kunjungan Wisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Rekap Data Kunjungan Wisatawan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
12	Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana perumahan dan pemukiman terutama pembangunan rumah layak huni	Status Lingkungan Hidup Daerah	$(30\% \times \text{IPU}) + (30\% \times \text{IPA}) + (40\% \times \text{ITH})$ IPU = Indeks Pencemaran Udara IPA = Indeks Pencemaran Air ITH = Indeks Tutupan Lahan / Hutan	SLHD	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Rumah Tinggal Penggunaan Air Bersih Dengan Sistem Perpipaan	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tinggal Penggunaan Air Bersih}}{\text{Jumlah Rumah Tinggal}} \times 100\%$	Rekap data rumah tinggal	Dinas PUPR, Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Persentase Penanganan Sampah	$\frac{\text{Volume sampah ditangani}}{\text{Volume sampah keseluruhan}} \times 100\%$	Rekap data penanganan sampah	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Penegakan Hukum Lingkungan	$\frac{\text{Jumlah kasus yang ditangani}}{\text{Jumlah kasus lingkungan}} \times 100\%$	Rekap data pelanggaran hukum lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Pengelolaan Air Limbah	$\frac{\text{Rumah tinggal bersanitasi}}{\text{Rumah tinggal keseluruhan}} \times 100\%$	Rekap data rumah tinggal bersanitasi	Dinas PUPR, Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Ibukota dan Pemerintahan	Jumlah RTH yang tersedia ----- x 100% Luas Kawasan Perkotaan	Rekap data RTH	Dinas PUPR, Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Penurunan Jumlah Kejadian Banjir	Jumlah kejadian banjir	Rekap kejadian banjir	BPBD
13	Peningkatan kapasitas jalan penghubung sentra-sentra ekonomi dan prasarana transportasi lainnya	Panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ----- x 100% Panjang jalan kabupaten	Rekap panjang jalan	Dinas PUPR, Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Wilayah yang memiliki akses jalan kabupaten	Jumlah jalan kabupaten baru	Rekap data panjang jalan kabupaten baru	Dinas PUPR, Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN.

HERSON MAYULU

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW SELATAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Sekretariat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja oleh Kementerian PANRB	Hasil Penilaian	Bagian Organisasi
		Persentase Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik	$\frac{\text{PD yang berkinerja Baik}}{\text{Jumlah PD}} \times 100\%$	Hasil Penilaian	Bagian Organisasi
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai dan Peningkatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Hasil Penilaian LPPD oleh Kemendagri	Laporan Hasil Penilaian LPPD	Bagian Tata Pemerintahan
3	Meningkatnya pembinaan, penataan dan pengkoordinasian dalam perumusan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi hukum, organisasi dan pemerintahan	Persentase produk hukum dan informasi hukum daerah yang berkualitas	$\frac{\text{Produk Hukum dan Informasi Hukum daerah yang berkualitas}}{\text{Jumlah Produk Hukum}} \times 100\%$	Rekap Data Produk Hukum	Bagian Hukum
		Persentase permasalahan hukum yang ditangani dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Permasalahan Hukum yang ditangani dapat diselesaikan}}{\text{Jumlah Permasalahan Hukum}} \times 100\%$	Rekap Data Permasalahan Hukum	Bagian Hukum

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indeks Reformasi Biokrasi	Hasil PMPRB	Hasil PMPRB	Bagian Organisasi
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey IKM	Bagian Organisasi
		Persentase Kecamatan yang melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan	$\frac{\text{Jumlah kecamatan yang melaksanakan PATEN}}{\text{Jumlah Kecamatan}} \times 100\%$	Rekap Data Kecamatan	Bagian Tata Pemerintahan
	Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan pedoman dan pelaksanaan kegiatan di bidang perekonomian, kesejahteraan rakyat dan pembangunan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan oleh Pemerintah Daerah	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh PEMDA}}{\text{Jumlah Kegiatan Keagamaan}} \times 100\%$	Rekap Data Kegiatan Keagaam	Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Persentase Jumlah Pengadaan Melalui LPSE	$\frac{\text{Jumlah Pengadaan Melalui LPSE}}{\text{Jumlah Pengadaan}} \times 100\%$	Rekap Data Pengadaan	Bagian Perekonomian dan Pembangunan
		Persentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	$\frac{\text{Realisasi APBD}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$	Rekap data APBD	Bagian Perekonomian dan Pembangunan
	Terwujudnya sumberdaya dan manajemen organisasi yang professional	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional aparatur selama 12 bulan	$\frac{\text{Jumlah Kebutuhan Dasar yang Terpenuhi}}{\text{Jumlah Kebutuhan Dasar yang Seharusnya dipenuhi}} \times 100\%$	Rekap Data Kebutuhan	Bagian Umum

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang perlengkapan, umum, humas dan protokol	Dokumen Perencanaan dan kinerja Setda memenuhi aspek kualitas	Dokumen Perencanaan dan Kinerja Setda yang memenuhi Aspek Kualitas	Hasil Evaluasi Bappeda	Bagian Umum
		Persentase kebijakan pemerintah daerah yang terpublikasi	$\frac{\text{Jumlah Kebijakan Pemerintah Daerah yang terpublikasi}}{\text{Jumlah Semua Kebijakan Pemerintah Daerah}} \times 100\%$	Data Publikasi kebijakan daerah	Bagian Humas

2. Sekretariat Dewan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda	$\frac{\text{Jumlah Ranperda yang disahkan}}{\text{Jumlah Ranperda yang dibahas}} \times 100\%$	Rekapitulasi Ranperda yang dibahas dan diundangkan	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
2	Terwujudnya sumberdaya dan manajemen organisasi yang profesional	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai indeks kepuasan masyarakat	Hasil survey kepuasan masyarakat	Bagian Umum

f

27. Kecamatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Survey tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan aparaturnya kecamatan	Hasil Survey	Sekretariat
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan di kecamatan	Persentase usulan masyarakat dalam musrembang yang disetujui tingkat Kabupaten	Jumlah usulan musrembang yang disetujui tingkat kabupaten ----- x 100% Total usulan musrembang	Rekap data musrembang	Sekretariat
3	Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan masyarakat di kecamatan	Persentase PKK Aktif di Kecamatan	Jumlah PKK yang aktif (desa) ----- x 100% Jumlah PKK yang ada (desa)	Rekap data Kegiatan PKK	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat
4	Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase penurunan terhadap pelanggaran PERDA	Jumlah pelanggaran	Rekap data pelanggaran	Seksi Trantib

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

HERSON MAYULU